

ABSTRACT

THE ROLE OF SUB WEHRKREISE 101 YOGYAKARTA IN INDONESIA SECOND WAR OF INDEPENDENCE (1948-1949)

By:
Swastika Niken Pratiwi
11407144001

In the Dutch second military aggression, was form a military defense as called *Wehrkreise* defense that require a guerilla war or entire citizen war and divided to *Sub Wehrkreise*. That is divide into seven sub, there is SWK 101, SWK 102, SWK 103A, SWK 103, SWK 104, SWK 105, and SWK 106. SWK 101 is such as sub be in Yogyakarta city. In that order and function is have a key position in this Indonesia second war of independence, as information giver troops of the Dutch power in city. In this historiography have a purpose for understand the key position of SWK 101 troops have to do in Indonesia second war of independence 1948-1949.

This research applies critical history research method that divided to four step. First, heuristic is data collection or relevant and appropriate the historical resource. Second, verification is data or resource investigation from the credibility and authenticity of resource. Third, interpretation is to find relevance of relationship meaning between facts which are obtained to be more meaningful. Fourth, historiography in order scientifically that can be continuous and chronological conclusion in historical work.

The result of this research shows that in military aggression, the citizen of Yogyakarta join to fight voluntary and help the guerilla fighter made against to the Dutch. The role of SWK 101 Yogyakarta is very significant and have a big influential in second war of independence 1948-1949. The SWK 101 Yogyakarta troops have a duty as spionage intelligent in the city who give information about condition and situation of the Dutch army in the city. And the else, SWK 101 troops have a duty to find the guerilla supplies and for the others. The SWK 101 troops divided into six sector, which is have a duty for retook the Dutch power in every post. In the military defense of Yogyakarta city also formed a soup kitchen, and red cross or health center for guerilla fighter. To made against, the SWK 101 troops doing the underground action in the city. They made attack and against to the Dutch army in the city or out of the city.

Key words: SWK 101, Yogyakarta, Indonesia Second War of Independence

ABSTRAK

PERANAN SUB WEHRKREISE 101 YOGYAKARTA DALAM PERANG KEMERDEKAAN INDONESIA KEDUA (1948-1949)

Oleh :
Swastika Niken Pratiwi
11407144001

Pada Agresi Militer Belanda yang kedua, dibentuklah sebuah pertahanan militer yang disebut pertahanan *Wehrkreise* yang mengharuskan adanya perang gerilya atau perang rakyat semesta dan dibagi menjadi *Sub Wehrkreise*. Pembagian SWK menjadi tujuh sub, yaitu SWK 101, SWK 102, SWK 103A, SWK 103, SWK 104, SWK 105, dan SWK 106. SWK 101 merupakan sub yang berada dalam Kota Yogyakarta. Dalam tugas dan fungsinya, SWK 101 mempunyai peran penting dalam Perang Kemerdekaan Indonesia kedua ini, yaitu sebagai pasukan pemberi informasi kekuatan Belanda di dalam kota. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peranan penting apa saja yang dilakukan oleh pasukan SWK 101 pada perang kemerdekaan kedua pada tahun 1948-1949.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari empat tahap. Pertama, heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber sejarah yang sesuai dan relevan. Kedua, kritik sumber yang merupakan tahap pengkajian data atau sumber dari segi kredibilitas dan otentisitas. Ketiga, penafsiran yaitu dengan mencari keterkaitan makna hubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, penulisan yang disusun secara ilmiah yang dapat disimpulkan secara kronologis dan berkesinambungan dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat terjadinya agresi militer, rakyat Yogyakarta ikut berjuang secara sukarela dan membantu gerilyawan dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Peranan dari pasukan SWK 101 Yogyakarta sangat penting dan berpengaruh besar pada perang kemerdekaan kedua tahun 1948-1949. Pasukan SWK 101 Yogyakarta bertugas sebagai spionase intelijen dalam kota yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tentara Belanda di dalam kota. Selain itu, pasukan SWK 101 bertugas untuk mencari perbekalan untuk para pasukan gerilya yang lainnya. Pasukan SWK 101 terbagi menjadi 6 sektor, yang masing-masing sektor ditugaskan untuk merebut kekuasaan tentara Belanda pada tiap-tiap posnya. Di dalam kantong pertahanan kota Yogyakarta pun dibentuk dapur umum, dan palang merah atau pos kesehatan bagi para pasukan gerilya. Dalam melakukan perlawanannya pasukan SWK 101 melakukan aksi bawah tanah yang berkantong di dalam kota. Melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap tentara Belanda di dalam maupun di luar kota Yogyakarta.

Kata kunci: SWK 101, Yogyakarta, Perang Kemerdekaan Indonesia II

A. Pendahuluan

Pada tanggal 15 Agustus 1945, secara resmi P.M. Suzuki mengumumkan berita penyerahan Jepang kepada Sekutu.¹ Dua hari setelah itu tanggal 17 Agustus 1945, di teras depan rumahnya Jalan Pegangsaan Timur No. 56 pukul 09.55 WIB proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno sebagai bukti bahwa Indonesia merdeka.² Di Yogyakarta berita kemerdekaan menyebar dari Masjid Besar dan Masjid Pakualaman, yang sebelumnya sudah diketahui dan diterima oleh Kantor Berita Domei Cabang Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jum'at jam 12.00 siang.³

Setelah terjadinya proklamasi, rakyat membentuk kelompok-kelompok bersenjata, baik besar maupun kecil dengan berpedoman mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dan menentang siapa saja yang mengancamnya. Kelompok tersebut terdiri dari para mantan personil *Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL), Pembela Tanah Air (Peta), laskar-laskar kecil, serta kelompok-kelompok yang berlandaskan ideologi religius. Pada bulan Oktober 1945 dibentuklah tentara nasional untuk mempertahankan Indonesia. Adanya kelompok atau laskar, dan tentara nasional dimaksudkan untuk mendesak Jepang menyerahkan persenjataan dan membuka gedung-gedung senjatanya. Di Yogyakarta rakyat harus bertempur dan menyerbu gudang senjata selama kurang lebih dua belas jam untuk membuat Jepang menyerah. Di kota besar lainnya, seperti Cirebon, Surabaya dan Bandung, rakyat harus takluk dengan tentara Jepang yang berhasil mempertahankan senjatanya sampai Inggris mengambil alih kekuasaan.

Keadaan di Indonesia menjadi kacau, pertempuran melawan tentara Jepang dan Sekutu berlangsung hingga menelan banyak korban. Berita pertempuran tersebut

¹ Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 48.

² Pierre Heijboer, *Agresi Militer Belanda: Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*, (Jakarta: Gramedia kerja sama dengan KITLV, 1998), hlm. 14.

³ Tashadi, dkk., *op. cit.*, hlm. 52.

sampai pada pemerintahan Belanda di Den Haag, maka pemerintah Belanda merasa sudah saatnya menangani sendiri masalah yang terjadi. Pada paruh tahun 1946, barulah Belanda mendaratkan pasukannya di wilayah Jawa dan Sumatera untuk mengambil alih daerah yang diduduki oleh Inggris. Namun, sebagian besar wilayah Jawa, dan Sumatera masih dalam kekuasaan pasukan Indonesia. Belanda menyerang wilayah Jakarta karena sebagai ibukota Republik Indonesia. Melihat suasana dan kondisi Jakarta yang tidak memungkinkan, maka ibukota dipindahkan ke Yogyakarta. Pada tanggal 4 Januari 1946, Yogyakarta resmi menjadi Ibukota Republik Indonesia.

Pada tanggal 14 Oktober 1946 pertama kalinya tercapai gencatan senjata. Hasil dari gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda, yaitu ditetapkannya “garis demarkasi”⁴ sebagai garis pemisah antara daerah kekuasaan Indonesia dengan daerah kekuasaan Belanda. Gencatan senjata yang dilakukan tidak berhasil karena tembak-menembak dan duel artileri pun terjadi antara kedua pihak. Pihak Belanda diwakili oleh H.J. van Mook, sedangkan pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir.

Pada tanggal 10-15 November 1946, terjadi perundingan di desa Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Linggarjati, yang ditandatangani secara sah pada tanggal 25 Maret 1947. Setelah Perjanjian Linggarjati ditandatangani, pertentangan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda semakin lama semakin keras dan masalah yang sudah dilupakan kembali muncul.⁵ Belanda mengirim ultimatum kepada Indonesia, bahwa harus mengundurkan para tentara Indonesia sejauh 10 km dari batas daerah yang diduduki Belanda. Indonesia menolak ultimatum tersebut dengan alasan bahwa Belanda hanya mencari alasan agar dapat melancarkan agresinya terhadap Indonesia. Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, Belanda berhasil melancarkan aksi yang disebut dengan “aksi polisini” yang diberi nama Operasi Produk atau dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Pelaksanaan

⁴ Garis demarkasi adalah garis batas atau garis pemisah yang ditetapkan antara dua pihak yang sedang berperang, tidak boleh dilanggar selama gencatan senjata berlangsung.

⁵ Tashadi, dkk., *op. cit.*, hlm. 105.

Agresi Militer Belanda I ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan tujuan untuk menduduki daerah Indonesia yang memiliki arti penting dalam segi ekonomi dan politiknya.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan untuk menghentikan aksi permusuhan antara Indonesia dengan Belanda. Aksi agresi tersebut berakhir pada tanggal 4 Agustus 1947 dengan adanya gencatan senjata antar kedua pihak, tetapi gencatan senjata yang dilakukan tersebut belum berhasil. Pada 25 Agustus 1947, dibentuklah sebuah komisi dengan masing-masing negara yang bermusuhan menunjuk satu negara sebagai wakil di komisi tersebut. Komisi tersebut terdiri dari tiga negara, yang seterusnya dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN), Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia, dan kedua negara (Indonesia dan Belanda) memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Australia diwakili oleh Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul Van Zeeland, dan Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham.⁶ Pada tanggal 14 Januari 1948, ditandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Renville yang menjadi akhir dari Agresi Militer Belanda I. Seperti halnya perundingan dan perjanjian yang sudah dilakukan oleh Belanda dan Indonesia, Perjanjian Renville sekali lagi diingkari oleh Belanda. Akibat dari pengingkaran Belanda ini, maka terjadilah Agresi Militer Belanda II yang akan menyerbu ibukota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948 pagi hari.

B. Keadaan Yogyakarta Saat Menjadi Ibukota Republik Indonesia

Setelah Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dua hari setelahnya Yogyakarta menyatakan masuk ke dalam Republik Indonesia. Pernyataan tersebut diumumkan oleh Sri Sultan Hamengku

⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal 19 Agustus 1945.⁷ Berita proklamasi meluas kepada rakyat Yogyakarta dengan diterbitkannya surat kabar Sinar Matahari pada tanggal 19 Agustus 1945, dengan itu rakyat Yogyakarta siap berjuang untuk membela kemerdekaan Indonesia. Demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, rakyat Yogyakarta melakukan suatu gerakan secara serentak yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dari tangan bangsa Jepang. Gerakan pembongkaran segel percetakan Sinar Matahari di bawah pimpinan Samawi dan Sumantoro, berhasil menguasai alat-alat percetakan. Selanjutnya, alat-lat percetakan yang berhasil direbut itu dijadikan modal untuk menerbitkan surat kabar Kedaulatan Rakyat.⁸ Pada tanggal 21 September 1945, secara berduyun-duyun pemuda dan rakyat Yogyakarta dari semua kalangan bergerak menuju gedung *Cokan Kantai*.⁹ Gerakan tersebut bertujuan untuk menurunkan bendera Hinomaru dan selanjutnya menaikkan bendera Merah Putih.

Malam hari tanggal 6 Oktober 1945 ratusan rakyat, pemuda, pasukan TKR, dan Polisi Istimewa mengepung *Kido Butai* Kotabaru. Pada pukul 10.30 tanggal 7 Oktober 1945 di atas markas Jepang berkibarlah bendera putih sebagai tanda *Kido Butai* Kotabaru menyerah.¹⁰ Pada tanggal 25 November 1945, pihak Sekutu menjatuhkan bom dari pesawat-pesawatnya kepada Yogyakarta. Akibat dari pemboman tersebut Pabrik Watson dan Stasiun Radio mengalami kerusakan dan juga korban manusia sebanyak 7 orang meninggal dan beberapa luka-luka. Setelahnya,

⁷Sutrisno Kutoyo, ed., *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997), hlm. 331.

⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

⁹ *Cokan Kantai* adalah Gedung Agung Jogja atau dikenal sebagai Istana Negara bagi Presiden Indonesia yang berkunjung ke Yogyakarta.

¹⁰ Tashadi, dkk., *op.cit.*, hlm. 54.

tanggal 27 November 1945 Yogyakarta kembali di bom oleh Sekutu dan menghancurkan Balai Mataram dan Sonobudoyo.¹¹

Sidang kabinet pada tanggal 3 Januari 1946 diambil keputusan untuk memindahkan kedudukan ibukota pemerintah pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta.¹² Pada tanggal 4 Januari 1946 ibukota pemerintahan untuk sementara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.¹³ Keadaan Yogyakarta sebagai ibukota pun mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, perubahan di segala bidang kehidupan terjadi di Yogyakarta, mulai dari kehidupan sosial ekonomi, dan kehidupan politik. Dikeluarkanlah Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk memperbaiki jalannya perekonomian karena uang Jepang saat itu mengalami inflasi yang sangat parah. Selain itu, ORI dikeluarkan untuk alat perjuangan dalam menghadapi Belanda oleh pemerintah. Dalam upaya perbaikan perekonomian, didirikan pula Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 1 November 1946. Tugas utama dari BNI tersebut adalah mengatur nilai tukar antara ORI dengan nilai valuta asing yang beredar di Indonesia.¹⁴

Pada tanggal 21 Juli 1947 Perjanjian Linggarjati dianggap tidak berlaku lagi bagi kedua pihak, dan terjadilah Agresi Militer Belanda I yang ingin menguasai daerah-daerah perkebunan dan daerah-daerah yang penting bagi Indonesia. Pada tanggal 25 Agustus 1947 dibentuklah sebuah komisi jasa untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda. Komisi itu terdiri dari tiga negara maka, dinamakan dengan Komisi Tiga Negara (KTN).

¹¹ Sutrisno Kutoyo, ed., *op. cit.*, hlm. 338.

¹² Atmakusumah, ed., *Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 65.

¹³ Tashadi, dkk., *op. cit.*, hlm. 63.

¹⁴ Sutrisno Kutoyo, ed., *op. cit.*, hlm. 364.

Upaya pemerintah untuk memperkuat dan menyempurnakan angkatan perang dan pertahanan, maka dilakukanlah Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Re-Ra) dalam tubuh angkatan perang Indonesia. Re-Ra ini adalah suatu bentuk dan cara pemerintah untuk melaksanakan kehendaknya agar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) menjadi suatu angkatan perang yang sempurna dan kuat.¹⁵ Pada tanggal 27 Februari 1948, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 9/1948 untuk menetapkan program Re-Ra tersebut. Pada tanggal 4 Mei 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 14/1948 dengan isi pokoknya adalah Kesatuan Mobil dan Teritorium tersusun dalam Komando Jawa dan Sumatera yang terdiri dari divisi dan sub teritorium. Pimpinan dari Komando Jawa adalah Jenderal A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorium Djawa (PTTD), dengan markas yang disebut Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang terletak di Yogyakarta. Sedangkan Komando Sumatera, pimpinannya adalah Jenderal Mayor Suharyo Haryo Wardoyo kemudian diganti oleh Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS), dengan markasnya Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) yang terletak di Bukittinggi.¹⁶

Melalui Komisi Tiga Negara (KTN), Dr. Beel secara resmi pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 menyatakan bahwa terhitung tanggal 19 Desember 1948 mulai pukul 00.00, Belanda secara *de facto* tidak lagi mengakui Republik Indonesia dan tidak terikat lagi dengan Perjanjian Renville. Pada esok harinya, sekitar pukul 05.15 Belanda melancarkan agresi militernya terhadap wilayah RI khususnya wilayah ibukota, Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan adanya serangan tiba-tiba dari Belanda tersebut, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengeluarkan Perintah Kilat No. 1/PB/D/48 yang berisi tentang penyerangan yang dilakukan oleh Belanda dan seluruh

¹⁵ Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sedjarah TNI-AD KODAM VII/Diponegoro: Sirnaning Jakso katon Gapuraning Ratu*, (Semarang: Jajasan Penerbit Diponegoro, 1968), hlm. 129.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

Angkatan Perang menjalankan rencana yang sudah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda. Serangan tersebut berupa pemboman atas lapangan terbang Maguwo disertai tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk.¹⁷ Perebutan lapangan terbang tersebut tidak berlangsung lama, hingga pukul 07.10 Maguwo sudah jatuh ke tangan pasukan Belanda sepenuhnya.

Setelah Lapangan Terbang Maguwo dapat dikuasai, Belanda segera mengatur gerakannya menuju Kota Yogyakarta yang berjarak kurang lebih 6 km dari Maguwo.¹⁸ Baru sekitar pukul 14.15 pasukan Belanda dapat mencapai tepi kota, kemudian pada pukul 16.00 seluruh Kota Yogyakarta berhasil diduduki oleh pasukan Belanda. Tempat-tempat penting dapat dikuasai oleh Belanda, seperti Istana Kepresidenan, Benteng Vredenburg, dan juga Markas MBKD sudah jatuh ketangan Belanda. Dengan dikuasainya Kota Yogyakarta, para pemimpin negara yang berada di istana, seperti Presiden, Wakil Presiden, Agus Salim, KSAU Komodor Suryadarma dan pemimpin lainnya dapat ditawan oleh Belanda. Para pemimpin negara diasingkan ke Bangka pada tanggal 22 Desember 1948.¹⁹

C. Profil Sub Wehrkreise 101 Yogyakarta

Sesuai dengan perintah siasat yang sudah dikeluarkan oleh Panglima Besar, maka pertahanan wilayah RI menggunakan sistem pertahanan kantong gerilya atau disebut *Wehrkreise* (WK). *Wehrkreise* merupakan pusat pertahanan dengan pembagian secara otoritas yang menjalankan kekuasaan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Menggunakan bentuk perlawanan gerilya yang dilancarkan secara luas dengan metode penyerangan serbu dan kemudian lari. Dalam bahasa Jerman, *Wehrkreise*

¹⁷ Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 334.

¹⁸ Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *op. cit.*, hlm. 158.

¹⁹ Tashadi, dkk., *op. cit.*, hlm. 81.

berasal dari kata *kreise* dan *wehr*.²⁰ Arti kata *kreise* adalah sistem pertahanan yang membagi-bagi daerah pertempuran dalam lingkaran-lingkaran, sedangkan kata *wehr* adalah yang dapat mengadakan pertahanan secara berdiri sendiri.

Susunan WK di Jawa Tengah terbagi menjadi dua bagian Gubernur Militer (GM), yaitu bagian timur dan barat. GM II Jawa Tengah bagian timur yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto terdiri dari empat kantong WK. Sedangkan, GM III Jawa Tengah bagian barat yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng terdiri dari tiga kantong WK. Divisi II atau GM II dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, Divisi III atau GM III dipimpin oleh Panglima Kolonel Bambang Sugeng.

Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk ke dalam *Wehrkreise* III yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Setelah melakukan perjalanan, maka diputuskan bahwa Letnan Kolonel Soeharto bermarkas di Desa Segoroyoso.²¹ Setelah ditetapkannya Letnan Kolonel Soeharto menjadi Komandan dari WK III, maka beliau mengatur siasat untuk membentuk sebuah bagian dari WK yang dikenal dengan *Sub Wehrkreise* (SWK). SWK di daerah Yogyakarta terbagi menjadi tujuh SWK. 1.

SWK 101 meliputi daerah Kota Yogyakarta dipimpin oleh Komandan Lettu Marsudi, SWK 102 meliputi daerah Bantul termasuk Bantul timur yang dipimpin oleh Komandan Mayor Sardjono, SWK 103 meliputi daerah Gamping yang dipimpin oleh Komandan Letnan Kolonel Soehoed, SWK 103A meliputi daerah Godean yang dipimpin oleh Komandan Mayor Soemoeal. SWK 104 meliputi daerah Sleman yang dipimpin oleh Komandan Mayor Soekasno, SWK 105 meliputi daerah Gunung Kidul yang dipimpin oleh Komandan Mayor Soedjono, SWK 106 meliputi daerah Kulon Progo yang dipimpin oleh Komandan Mayor Soedarto.

²⁰ Moehkardi, *Pelajar Pejuang Tentara Genie Pelajar 1945-1950*, (Surabaya: Yayasan Ex Batalyon TGP Brigade XVII, 1983), hlm. 180.

²¹ SESKOAD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 DIY: Latar Belakang dan Pengaruhnya*, (Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1990), hlm. 126.

Sub Wehrkreise 101 ini berkedudukan di dalam Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Lettu Marsudi. Markasnya berada di Prabeyo (dapur Keraton), dan wilayah yang termasuk ke dalam SWK 101 ini meliputi Kota Yogyakarta dengan batas-batas tertentu. Keberadaan pasukan SWK 101 ini tidak diumumkan secara luas karena pertimbangan untuk penyamaran dan keamanan pasukan yang berada di tengah-tengah kekuatan tentara Belanda di dalam kota.²² Pembentukan pasukan SWK 101 terjadi pada saat serangan balasan kepada tentara Belanda pada tanggal 16 Januari 1949. SWK 101 ini dibagi menjadi enam sektor dan di tiap-tiap sektor ditambah pasukan dan bantuan dari rakyat. Dalam upaya untuk menjaga kelangsungan perlawanan dari tiap-tiap sektor, tidak heran jika markasnya selalu berpindah-pindah tempat atau nomaden.²³ Fungsi atau tugas dari pasukan SWK 101 ini terbagi menjadi dua, yaitu mencari perbekalan untuk pasukan gerilya, dan menjadi spionase dan melakukan perlawanan di dalam kota Yogyakarta. Spionase yang dimaksud adalah memata-matai tentara Belanda dengan menjadwalkan konvoi yang akan menuju ke Semarang yang dilakukan kurang lebih dua hari sekali.²⁴

Pasukan SWK 101 Yogyakarta termasuk pasukan dalam kota, pasukan ini terdiri dari TNI, Tentara Pelajar, gerilyawan dari para pemuda, serta laskar rakyat. Di samping adanya kekuatan TNI dan gerilyawan yang ada di Kota Yogyakarta, dibentuk pula Pasukan Hantu Maut. Anggota dari pasukan ini terdiri dari unsur pemuda dan rakyat dari kampung Prawirotaman, dan Mantrijeron yang keluar dari dalam kota yang sudah terbentuk, dan terorganisir, kemudian bergabung dan

²² Tugas Tri Wahyono, “Peranan Sub Wehrkreise 101 Pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua di DIY (Suatu Kajian Sejarah Lisan)”, *Patrawidya*, No. 3, (Vol. 6, Tahun 2005), hlm. 95.

²³ SESKOAD, *op. cit.*, hlm. 180.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Samdhi di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2016.

termasuk dalam Batalyon Sarjono dan dipimpin oleh Basuki Widodo yang bermarkas di Pujokusuman.²⁵ pasukan SWK 101 mendapat bantuan pasukan besar 2 Seksi dari Komando WK III, yaitu Seksi Mardjoeki, dan Seksi Zahid Hoesein dari Yon Soedjono. Dalam pasukan SWK 101 juga terdiri dari sukarelawan yang dijadikan sebagai kurir pengantar, intelijen, serta mata-mata untuk mendapatkan informasi. Mayoritas dari para sukarelawan tersebut adalah para pemuda atau pun para pelajar baik perempuan maupun laki-laki.

Di dalam kota pun terdapat palang merah yang mengurus tentang kesehatan dan juga yang mengurus para korban yang terluka. Palang merah yang ada di wilayah dalam kota banyak, tetapi secara terselebung atau diam-diam. Selain itu, para warga juga memberikan bantuan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh para pasukan, seperti obat-obatan, sembako, dan kebutuhan yang lainnya, maka peranan warga dalam kota sangat membantu sekali untuk para pasukan.²⁶

D. Perlawanan Sub Wehrkreise 101 Yogyakarta

Keberhasilan pasukan tentara Belanda yang menduduki ibukota Yogyakarta dalam waktu yang singkat, telah mengurangi kepercayaan rakyat terhadap TNI karena terkesan lemah dan tidak mampu melawan. Pemerintahan militer memutar otak untuk melakukan pembuktian terhadap rakyat dan juga terhadap dunia internasional, bahwa TNI masih tetap ada, dan negara Republik Indonesia masih tetap utuh. Serangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut belum sesuai dengan sasaran perjuangan untuk mendukung kepentingan politik, dan militer, maka direncanakanlah serangan balasan yang teratur dan perlawanan yang secara terus-menerus. Serangan balasan

²⁵ Wawancara dengan Ibu Juwariyah di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2016.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Juwariyah di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2016.

yang dilakukan adalah berupa serangan secara serentak sesuai dengan kedudukan SWK serta sektor-sektor yang telah dibagi. Serangan balasan ini dilakukan sebanyak 4 kali sebelum diadakannya serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949.

Serangan balasan yang dilakukan pertama kali dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1948 yang dipimpin langsung oleh Komandan Brigade 10. Serangan tersebut dilakukan secara rahasia dan menyeluruh di setiap sektor. Serangan balasan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 1949, Serangan balasan yang kedua ini dilakukan pada malam hari, sama seperti serangan balasan sebelumnya. Dalam penyerangan ini menggunakan tanda janur kuning atau tangan kiri yang diangkat ke atas dengan sandi “Mataram-Menang”. Pada tanggal 16 Januari 1949, dilaksanakan serangan balasan yang ketiga dan sudah diperintahkan kepada masing-masing SWK. Kepada masing-masing SWK, diperintahkan untuk menghancurkan, menghadang dan juga menyerang di setiap sektornya masing-masing. Serangan balasan tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing SWK, selain itu juga harus tetap bergerak secara serentak. Serangan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1949, dengan rute dan sasaran penyerangan yang sama seperti serangan kedua dan ketiga. Maksud diadakannya serangan balasan keempat ini adalah untuk melihat kesiapan terhadap serangan umum yang akan dilakukan serentak pada siang hari.

Peranan SWK 101 sangat diharapkan karena untuk melaksanakan serangan yang berat, harus ada persiapan yang mantap dan dilakukan dengan penuh rahasia.²⁷ Peranan SWK 101 dalam Serangan Umum ini adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan bantuan administrasi selama pelaksanaan serbuan. SWK 101 bertugas untuk membantu SWK penyerbu dengan mengarahkan semua sektor-sektornya.²⁸ Pada saat pengunduran pasukan WK III, SWK 101 kembali bertugas membantu SWK penyerbu sebagai petunjuk jalan. Selain itu juga, aktif melindungi

²⁷A. Eryono, *Mengenang Perjuangan Letkol Soeharto di Yogyakarta*, (Jakarta: Yayasan 1 Maret 1949, tt), hlm. 30.

²⁸SESKOAD, *op. cit.*, hlm. 201.

pengunduran SWK lainnya dengan serangan terbatas untuk mencegah pengejaran tentara Belanda yang dilakukan dengan mengerahkan sektor-sektornya. Sebagian besar pasukan SWK 101 banyak yang ikut serta mengundurkan diri keluar kota, namun banyak juga yang masih tetap tinggal di dalam kota dengan berbaur bersama rakyat.²⁹

Perlawanan yang dilakukan pasukan SWK 101 selain di dalam kota adalah membantu pasukan SWK lainnya untuk melakukan perlawanan di luar kota dan perbatasan dalam kota. Di daerah Bantul, pasukan SWK 101 bersama dengan pasukan SWK 102 melakukan perlawanan pada sore hari. Perlawanan yang dilakukan pasukan SWK 101 lainnya adalah melakukan penghadangan terhadap tentara bantuan Belanda di daerah Pleret baik pada pagi hari maupun malam hari. Mereka melakukan perlawanan agar pasukan tentara bantuan Belanda tidak dapat masuk ke dalam kota kembali.

Dalam gencatan senjata, peran dari SWK 101 pun terlihat, dengan ditetapkannya Lettu Marsudi sebagai perwakilan dalam perundingan gencatan senjata dan rencana penarikan pasukan tentara Belanda bersama dengan Menteri Negara dan Koordinasi Pertahanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX.³⁰ Kekuasaan ibukota Yogyakarta kembali ke tangan pemerintah Republik Indonesia yang ditandai dengan surat penetapan Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menjabat Menteri Negara dan Koordinator Keamanan. Isi surat penetapan itu adalah Presiden Soekarno memberi tugas kewajiban kepada Sri Sultan Hamengku Buwono

²⁹ Wawancara dengan Bapak Samdhi di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2016.

³⁰ Arsip Museum Mandala Bhakti Kodam VII/Diponegoro Semarang, *Surat Komandan WK III kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX tentang perwakilan dalam perundingan gencatan senjata dan penarikan tentara Belanda*, 1949.

IX untuk menerima kembali sepenuhnya, baik sipil maupun militer atas Daerah Istimewa Yogyakarta dari tangan Belanda.³¹

E. Kesimpulan

Upaya dalam mengatasi blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda adalah dengan dikeluarkannya Oeang Republik Indonesia sebagai alat perjuangan menghadapi Belanda, serta untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Dalam upaya untuk mengatur nilai tukar valuta asing, didirikan Bank Negara Indonesia. Upaya diplomasi dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara Indonesia dengan Belanda, baik dengan cara gencatan senjata, maupun melakukan perundingan-perundingan. Perundingan yang dilakukan antara lain Perundingan Linggarjati, dan Perundingan Renville, serta uoaya dari PBB dengan membentuk KTN.

. Daerah Yogyakarta termasuk ke dalam WK III dan terbagi menjadi tujuh SWK, yaitu SWK 101 di Kota Yogyakarta, SWK 102 di Bantul, SWK 103A di Gamping, SWK 103 di Godean, SWK 104 di Sleman, SWK 105 di Gunung Kidul, dan SWK 106 di Kulon Progo. *Sub Wehrkreise* 101 dipimpin oleh Letnan Satu (Lettu) Marsudi yang bermarkas di Gedung Prabeyo atau Dapur Keraton yang terletak di sebelah timur Pagelaran Keraton. Dalam menjalankan tugasnya, SWK 101 ini dibagi menjadi enam sektor untuk memudahkan koordinasi dengan pasukan SWK yang berada di luar kota lainnya.

Pasukan SWK 101 bertugas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan bantuan administrasi selama pelaksanaan serbuan. Mereka siap membantu pasukan SWK penyerbu dengan tugas masing-masing yang sudah diberikan kepada setiap pembagian sektor. Tiap-tiap sektor memiliki tugas masing-masing, membantu pasukan penyerbu dengan menyediakan informasi, menyiapkan pemuda setempat

³¹ Arsip Museum Mandala Bhakti Kodam VII/Diponegoro Semarang, *Penetapan Presiden RI kepada Menteri Negara dan Koordinator Keamanan mengenai penerimaan kekuasaan Yogyakarta kembali*, 1949.

sebagai petunjuk jalan serta mengkoordinasikan bantuan logistik makanan dan minuman. Pasukan yang termasuk dalam SWK 101 adalah pasukan TNI, TP, Laskar Rakyat, serta para pemuda dan warga yang secara sukarela membantu perjuangan para pasukan tentara. Lembaga yang berperan penting dalam pasukan dalam kota tersebut pun banyak, yakni adanya palang merah yang membantu korban terluka serta warga yang terkena penyakit.

Dapur umum pun didirikan bergiliran antar desa, dan kedudukannya berpindah-pindah agar tidak diketahui oleh Belanda. Peran yang dilakukan oleh pasukan SWK 101 tidak hanya di dalam kota Yogyakarta saja, namun setelah berakhirnya Serangan Umum 1 Maret 1949 mereka membantu pasukan SWK 102 dalam melakukan perlawanan di daerah Bantul. Selain itu, pasukan SWK 101 melakukan pertahanan dengan menghadang pasukan tentara bantuan Belanda di daerah Pleret. Peran yang penting juga dijalankan oleh pemimpin pasukan SWK 101, yaitu Lettu Marsudi. Beliau menjalankan perannya dengan menjadi perwakilan dalam perundingan gencatan senjata bersama dengan Menteri Negara dan Koordinator Keamanan. Selain itu, beliau menjadi penggerak dalam rencana penyerangan saat Serangan Umum 1 Maret 1949 berlangsung, maka tercapailah tujuan dari Serangan Umum 1 Maret 1949, yaitu penarikan pasukan tentara Belanda dari wilayah Yogyakarta, dan kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Dengan adanya Serangan Umum 1 Maret 1949, tercapai sasaran politik, bahwa kekuasaan Indonesia masih ada, sasaran militer, bahwa kekuatan TNI masih ada, dan sasaran psikologi dengan kembalinya kepercayaan rakyat terhadap TNI yang berhasil mengusir Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Arsip Museum Mandala Bhakti Kodam VII/Diponegoro Semarang, *Surat Komandan WK III kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX tentang perwakilan dalam perundingan genjatan senjata dan penarikan tentara Belanda*, 1949.
- Arsip Museum Mandala Bhakti Kodam VII/Diponegoro Semarang, *Penetapan Presiden RI kepada Menteri Negara dan Koordinator Keamanan mengenai penerimaan kekuasaan Yogyakarta kembali*, 1949.

Buku, Artikel dan Jurnal

- A. Eryono, *Mengenang Perjuangan Letkol Soeharto di Yogyakarta*, Jakarta: Yayasan 1 Maret 1949, tt.
- Atmakusumah, ed., *Tahta Untuk Rakyat Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982.
- Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Heijboer, Pierre, *Agresi Militer Belanda: Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*, Jakarta: Gramedia kerja sama dengan KITLV, 1998.
- Moehkardi, *Pelajar Pejuang Tentara Genie Pelajar 1945-1950*, Surabaya: Yayasan Ex Batalyon TGP Brigade XVII, 1983.
- Sedjarah Militer Kodam VII/Diponegoro, *Sedjarah TNI-AD KODAM VII/Diponegoro: Sirnaning Jakso katon Gapuraning Ratu*, Semarang: Jajasan Penerbit Diponegoro, 1968.
- SESKOAD, *Serangan Umum 1 Maret 1949 DIY: Latar Belakang dan Pengaruhnya*, Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1990.
- Sutrisno Kutoyo, ed., *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.
- Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.
- Tugas Tri Wahyono, "Peranan Sub Wehrkreise 101 Pada Masa Perang Kemerdekaan Kedua di DIY (Suatu Kajian Sejarah Lisan)", *Patrawidya*, No. 3, Vol. 6, Tahun 2005.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Samdhi di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2016.

Wawancara dengan Ibu Juwariyah di Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2016.

Yogyakarta, 14 November 2016

Pembimbing

Reviewer

Drs. Djumarwan
NIP. 19560101 198502 1 001

Dina Dwi Kurniarini, M. Hum
NIP. 19571209 198702 2 001